

Temuan BPK Terhadap Keuangan Kapuas Hulu

Putussibau, BERKAT.

Hasil temuan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2011 mencantumkan lima temuan kepatuhan dan lima temuan sistem pengendalian intern.

Temuan kepatuhan ini berupa kewajiban terhadap pemerintah pusat Rp38.418.780.249,72. Ini merupakan hutang PSDR-DR tahun 2001-2005 Kapuas Hulu kepada pemerintah pusat.

Hutang ini harus dilunasi sebagaimana rekomendasi BPK-RI didalam hasil temuan terhadap laporan keuangan pemerintah Kapuas Hulu TA 2011.

"Temuan kepatuhan kedua, pekerjaan abutment jembatan sungai Sibau yang diputus kontrak masih kurang bayar Rp 797.746.562,80 pada Dinas Bina Marga dan Perairan," papar Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH, saat memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu, Rabu (10/10) di Aula DPRD Kapuas Hulu.

Temuan kepatuhan ketiga, kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan sebesar Rp 30.787.659,79, yaitu pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta

pada Dinas Perikanan. Keempat jaminan pelaksanaan atas kontrak yang mengalami pemutusan belum dilakukan penarikan sebesar Rp 97.726.750. "Kemudian yang terakhir realisasi bantuan sosial TA 2011 belum dilengkapi dengan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 737.182.500 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat," jelas Bupati.

Sementara itu lima temuan BPK RI pada sistem pengendalian intern, yang pertama nilai persediaan sebesar Rp 1.337.132.774,50 pada RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, serta pada Disdukcapri Kapuas Hulu TA 2011. Sesuai dengan rekomendasi BPK RI, bahwa telah disurati kepada SKPD terkait agar dapat menyelenggarakan pengelolaan dan penatausahaan persediaan dengan baik dan benar. Kedua, penyajian investasi non permanen-dana bergulir per 31 Desember 2011 sebesar Rp 865.379.500 pada Disperindagkop yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

"Nilai dana bergulir merupakan saldo dana bergulir berdasarkan catatan dari

tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi pembayaran kembali ke kas daerah. Rekomendasi BPK RI terkait temuan ini adalah melakukan koordinasi antara pejabat penatausahaan keuangan daerah dengan bidang koperasi dan UKM," ulas Bupati.

Temuan ketiga, lanjutnya, penyajian investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2011 sebesar Rp 21.182.000.000 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Kendala yang dihadapi didalam penentuan nilai penyertaan modal pada PDAM, karena laporan keuangannya yang semestinya disampaikan kepada pemda selalu mengalami keterlambatan.

Bahkan ditahun 2011 PDAM tidak membuat laporan keuangan, sehingga sulit untuk menentukan nilai rugi atau laba yang harus dikompensasikan sebagai pengurangan dan penambahan nilai penyertaan modal pemda.

Namun sesuai rekomendasi BPK RI, telah dilakukan dua kali rekonsiliasi nilai penyertaan modal. Temuan keempat pengelolaan serta penatausahaan aset tetap pemda Kapuas Hulu belum memadai pada SKPD dan bidang aset pada

DPPKAD.

Saat ini sedang melakukan proses inventarisasi dan rekonsiliasi aset tetap sesuai rekomendasi BPK RI. Sedangkan terakhir belanja bantuan sosial Rp 598.500.000, belanja barang dan jasa Rp 2.627.701.600, serta belanja modal Rp 7.724.993.920 yang dianggarkan pada akun tidak tetap.

"Sesuai rekomendasi BPK RI telah diberikan sanksi tertulis kepada pihak-pihak terkait dan kedepannya tim penganggaran akan lebih cermat didalam mengklasifikasi jenis belanja," tutur Bupati.

Disamping itu ada pula temuan yang berulang dari tahun 2010, tambahnya, yaitu terdapat pada pengelolaan penyediaan obat-obatan di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau dan blangko KTP/KK pada Disdukcapil Kapuas Hulu.

Sementara yang lainnya pada pengelolaan aset meliputi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, serta aset tetap jalan, ingasi dan jaringan pada sebagian besar SKPD. Hal ini disebabkan masih dalam proses inventarisasi dan rekonsiliasi aset. (nes)